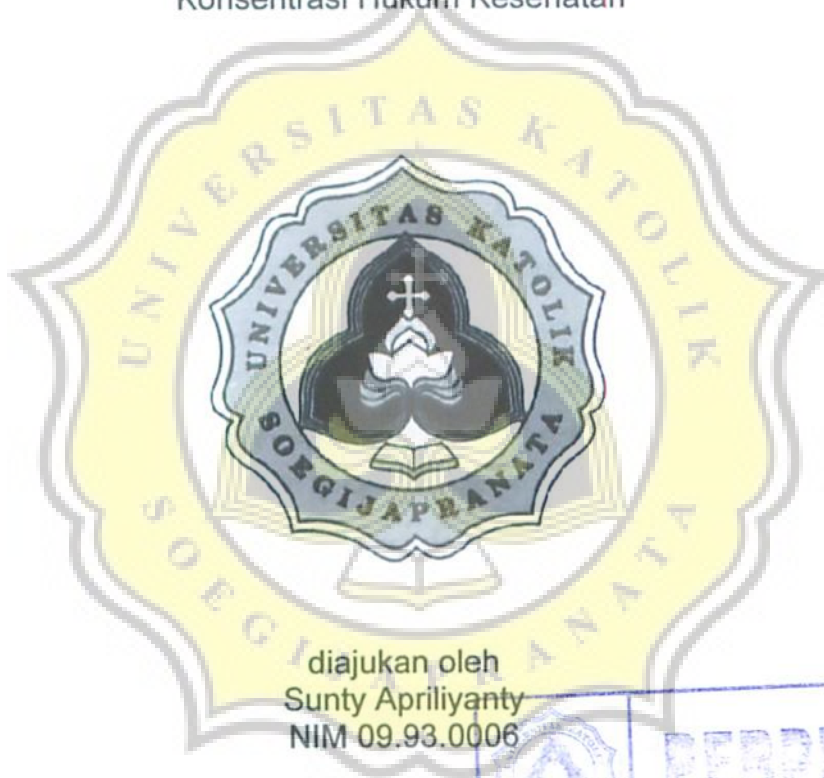



**PERAN ORGANISASI PROFESI BIDAN (IBI) DALAM PENGAWASAN
BIDAN PRAKTIK MANDIRI DI KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

TESIS
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



	PERPUSTAKAAN
NO. INV :	214/Sa/MHK/C1
TGL :	17/04 '12
PARAF :	uf

kepada

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2011

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : SUNTY APRILIYANTY

Nim : 09.93.0006

laha dipertahankan di depan Dewan Penguji

da hari / tanggal : Rabu, 20 Juli 2011

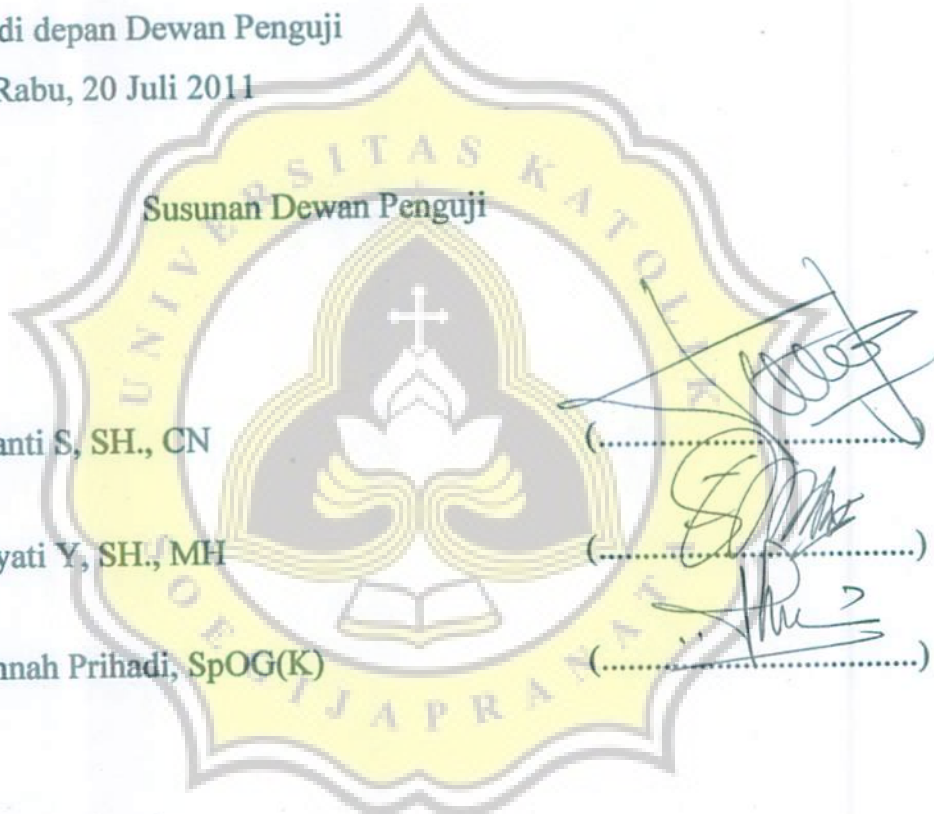
Susunan Dewan Penguji

osen Penguji :

Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN

Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

dr. Siti Moetmainnah Prihadi, SpOG(K)



Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu, 20 Juli 2011


(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb
Bismillahirrohmanirrohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Peran organisasi profesi bidan (IBI) dalam pengawasan bidan praktik mandiri di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah”**.

Tesis ini disusun untuk meneliti sejauhmana peran Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam melakukan pengawasan terhadap bidan praktik mandiri di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa peran IBI dalam pengawasan didasarkan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, sehingga menarik untuk diteliti sejauhmana Permenkes ini menjadi perangkat yuridis untuk IBI dalam melakukan pengawasan terhadap bidan praktik mandiri. Tesis ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Suatu hasil karya yang memberikan kebahagiaan tersendiri bagi penulis, walaupun karya ini masih jauh dari sempurna. Sebagai manusia biasa penulis sadari bahwa kesalahan dan kekhilafan tidak dapat dihindari, walaupun segala cara dan usaha telah penulis lakukan untuk menuju kesempurnaan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih sederhana, hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan serta terbatasnya waktu yang ada pada diri penulis. Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini akan penulis terima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala

bantuan, bimbingan dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam membantu penulisan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc, selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Dr. Ir. A. Rudyanto Soesilo, MSA, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan semangat dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini mulai dari awal sampai dengan selesainya tesis ini.
4. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan semangat dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini mulai dari awal sampai dengan selesainya tesis ini.
5. Ibu Sri Puji Astuti, SKM. M.Kes selaku ketua IBI cabang Kabupaten Demak yang telah membantu dan memberikan izin untuk penelitian mengenai permasalahan judul tesis ini.
6. Teman-teman Bidan Kabupaten Demak, yang telah bersedia menjadi responden dengan memberikan waktunya untuk mengisi kuesioner dan wawancara mengenai permasalahan judul tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada kami selama ini.
8. Semua Staf Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bantuan secara teknis maupun administrasi kepada kami atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis mulai dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.

9. Suami tercinta Mustaqin, S.Kep. Ns dan putri-putriku Farras Syahla Salsabila dan Farhah Meutia Faiq Azzahra tersayang yang telah memberikan dorongan, inspirasi dan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada penulis serta selalu memberikan do'a kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
10. Sahabatku Bapak Sadono Wiwoho, SKM. M.Kes dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang secara langsung membantu dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata semoga kebaikan dan budi Bapak / Ibu / Saudari yang telah memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini mendapat balasan dari Allah SWT, Amien. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum kesehatan khususnya tentang hukum praktik kebidanan.

Akhirul Kalam,
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2011
Penulis

Sunty Apriliyanty

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Halaman Pernyataan	x
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Penyajian Tesis.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran Organisasi Profesi (IBI).....	18
1. Pengertian Peran.....	18
2. Pengertian Organisasi Profesi Bidan (IBI).....	19
3. Bidan Sebagai Profesi.....	26
4. Organisasi Profesi Bidan.....	29
B. Pengawasan.....	33
1. Pengertian Pengawasan.....	33
2. Tujuan Pengawasan.....	34
3. Fungsi Pengawasan.....	36
4. Macam-macam Pengawasan.....	37
C. Bidan Praktik Mandiri (BPM).....	41

D. Ketentuan Hukum Peran Organisasi Profesi Bidan (IBI) Untuk Melakukan Pengawasan Bidan Praktik Mandiri.....	46
E. Kewenangan Bidan Praktik Mandiri.....	47
F. Istilah-Istilah Hukum Tentang Praktik Mandiri.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum IBI Cabang Kabupaten Demak	54
1. Struktur Organisasi IBI Cabang Kabupaten Demak.....	54
2. Keanggotaan IBI Cabang Kabupaten Demak.....	56
3. Kegiatan Organisasi IBI Cabang Kabupaten Demak....	58
B. Kesiapan IBI dan Anggotanya dalam Pelaksanaan Permenkes 1464/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Demak.....	64
1. Kesiapan IBI dalam Pelaksanaan Permenkes 1464/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Demak.....	64
2. Kesiapan Anggota IBI dalam Pelaksanaan Permenkes 1464/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Demak.....	67
C. Peran IBI dalam Pengawasan Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Demak	75
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	105
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Sikap anggota IBI terhadap Permenkes 1464/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.....	67
Tabel 2 Sikap anggota IBI yang nyaman terhadap Kepmenkes 900/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.....	71
Tabel 3 Pengetahuan terhadap aturan-aturan hukum dan perundang-undangan.....	74
Tabel 4 Penerapan praktik mandiri bidan di sarana kesehatan.....	77
Tabel 5 Sikap anggota IBI tentang SIPB.....	79
Tabel 6 Sikap anggota IBI terhadap praktik mandiri.....	82
Tabel 7 Tanggapan anggota IBI terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh IBI di Kabupaten Demak	85

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sunty Apriliyanty, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 09.93.0006,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juni 2011

Sunty Apriliyanty

ABSTRAK

Peran IBI, ditinjau dari segi hukum terbagi dalam dua bentuk yakni: peran imperatif dan peran fakultatif. Peran imperatif yaitu peran wajib yang didalamnya memuat peran pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bidan praktik mandiri. Sedangkan peran fakultatif adalah peran tidak wajib yang memuat peran pengembangan mutu pelayanan kebidanan. Peran organisasi IBI dalam pengawasan bidan praktik mandiri merupakan salah satu peran imperatif, yang intinya adalah mengawasi dan membina bidan untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan selalu menjaga mutu pelayanan sesuai dengan kewenangan dan didasarkan pada standar profesi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dengan spesifikasi deskriptif analitis. Adapun metode samplingnya ditetapkan secara *purposive sampling*. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan baik melalui studi lapangan untuk memperoleh data primer, dan studi lapangan untuk memperoleh data sekunder.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa IBI sebagai salah satu unsur pengawas yang mendapatkan atribusi dari Permenkes 1464/2010, belum dapat melakukan secara optimal baik ditinjau dari fungsi organisasi, segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, maupun dari segi saat/waktu dilaksanakannya pengawasan. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain : 1). Ditinjau dari segi organisasi profesi (IBI) karena keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari pengurus organisasi, 2). Ditinjau dari sisi anggota IBI yakni, masih rendahnya kesadaran hukum anggota IBI, hal ini tampak dengan masih adanya bidan yang melaksanakan praktik mandiri tanpa registrasi dan legislasi, 3). Ditinjau dari segi masyarakat karena belum bisa membedakan pelayanan bidan praktik mandiri yang berkualitas dalam arti pelaksanaan praktiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar pelayanan dan standar profesi, 4). Ditinjau dari segi Pemerintah karena belum ada perhatian pemerintah daerah secara khusus yang mengatur tentang pelaksanaan bidan praktik mandiri.

Kata Kunci : Peran, Organisasi IBI, Pengawasan, Bidan Praktik Mandiri

ABSTRACT

The role of IBI viewed from legal aspect divided in two form, namely: imperative role and facultative role. Imperative role is a compulsory role in which load role of guidance and controlling of midwifery practice implementation. Where as facultative role is a non compulsory role in which load role of developing midwifery service quality. IBI organization role is controlling midwife practice is an imperative role which is essence is to oversee and foster midwife to be able to carry out the professional task by always keeping the quality of service accordance with the authority and based on professional standards.

The method of the research is socio-legal approach with analytic descriptive specification. As for the sampling method specified using purposive sampling. While data gathering dove by field study to get primary data and field study to get secondary data.

Research result can be seen that IBI as one of the main elements of the regulatory who get the attribution of ministry of health regulation (Permenkes 1464/2010), have not been able to perform optimally in term of organization function, the unit that conduct monitoring, nor in term of time for controlling. This is motivated by several factors, among others: 1). Viewed from the profession organization (IBI) due to limited funds, time and personal of the organization committee, 2). Viewed from the side of IBI member that is stil low awareness of legal aspect, this is seen by the persistence of the practice of midwifery without registration and legislation, 3). Viewed from the side of society because it can not distingvish of qualified in midwife practice which mean the implementation of service in accordance with laws and regulations applicable and accordance with service standars and professional standars, 4). Viewed from the side of government because there is no special concern of local government that regulate the implementation of midwife practice.

Key words: Role, IBI Organization, Monitoring, Midwife and Practice.